



Peristiwa 1965 dalam Cerpen-Cerpen Pilihan Kompas: Analisis Wacana Kritis

Nafisah, Achmad Muchtar, Galih Pangestu Jati
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Email: nafisah@walisongo.ac.id

Abstract

This study discusses the events of 1965 in a collection of short stories selected by Kompas. Since the publication of the first collection of short stories selected by Kompas in 1992, around 20% of short stories that tell the story of the events of 1965 have been found. In its journey, the disclosure of the events of 1965 in short stories has a different meaning between those published during the New Order era in power and the period after the regime stepped down.

This study aims to determine the narrative and description of the events of 1965 in the short stories selected by Kompas. The theory used in this research is Michel Foucault's critical discourse analysis.

The results of this study are short stories about the 1965 events that were published when the New Order was in power, containing the discourse of placing the PKI masses as the guilty party. In addition, another discourse is the existence of the legitimacy of violence which is based on the 1965 Incident. Due to this incident, other parties are allowed to commit violence against the guilty party, in this case the PKI. The short stories about the 1965 events that were published after the New Order came to power contain the discourse that people close to communists were accused of being communists, even though they were not affiliated with the PKI. In addition, at this time, the discourse on the 1965 incident which was used to legitimize violence is still clearly visible in the short stories of Kompas. This is used to support the first discourse, which is to reveal how the suffering caused by the accusation.

Keywords: *1965 Incident, Compass Choice Short Story*

Abstrak

Penelitian ini membahas peristiwa 1965 dalam buku kumpulan cerpen pilihan Kompas. Sejak diterbitkannya kumpulan cerpen pilihan Kompas pertama pada tahun 1992, ditemukan sekitar 20% cerpen yang bercerita mengenai peristiwa 1965. Dalam perjalanannya, pengungkapan peristiwa 1965 di dalam cerpen mengalami perbedaan makna antara yang terbit saat Orde Baru berkuasa dengan masa setelah rezim tersebut lengser.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui narasi dan deskripsi peristiwa 1965 dalam cerpen pilihan Kompas. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis Michel Foucault.

Hasil dari penelitian ini adalah cerpen-cerpen mengenai Peristiwa 1965 yang terbit saat Orde Baru berkuasa memuat wacana penempatan massa PKI sebagai pihak yang bersalah. Selain itu, wacana yang lainnya adalah adanya legitimasi kekerasan yang bertumpu pada Peristiwa



1965. Oleh adanya peristiwa ini, pihak lain diperbolehkan untuk melakukan kekerasan terhadap pihak yang bersalah, dalam hal ini PKI. Adapun cerpen-cerpen mengenai Peristiwa 1965 yang terbit setelah Orde Baru berkuasa memuat wacana bahwa orang yang dekat dengan orang-orang komunis dituduh sebagai komunis, padahal mereka tidak berafiliasi dengan PKI. Selain itu, pada jelas di dalam cerpen-cerpen *Kompas*. Hal ini digunakan untuk mendukung wacana yang pertama, yaitu untuk mengungkap bagaimana penderitaan yang disebabkan oleh tuduhan tersebut.

Kata kunci: Peristiwa 1965, Cerpen Pilihan Kompas

Pendahuluan

Peristiwa 1965¹ tidak hanya mengawali berubahnya kekuasaan dari Orde Lama² ke Orde Baru, tetapi juga berdampak pada munculnya angkatan baru dalam sastra Indonesia, yaitu Angkatan 66³. Angkatan 66 merupakan kelompok sastrawan yang awalnya menolak keberadaan Lekra (organisasi *underbouw* PKI). Seperti halnya Angkatan Pujangga Baru yang memiliki media penyebaran karya sastra, Angkatan 66 masa ini, wacana mengenai Peristiwa 1965 yang dijadikan legitimasi kekerasan masih tampak lahir dengan majalah *Horison* dan *Sastra*. Kedua majalah ini memublikasikan karya-karya Angkatan '66 dengan sejumlah karya baru dalam paham humanisme universal.

Dalam perkembangannya, paham tersebut tidak hanya menjadi pedoman di kedua media sastra tersebut, tetapi juga dipegang-teguhi oleh sejumlah media massa, yang memuat karya sastra, yang lahir bersamaan dengan pemerintahan Orde Baru. Paham tersebut seolah menjadi benteng agar paham “politik sebagai panglima” atau khususnya paham komunis tidak masuk ke dalam karya sastra. Apa yang terjadi kemudian karya-karya sastra Indonesia, baik puisi maupun prosa, amat jarang membicarakan persoalan politik. Tentu, hal ini tidak lepas pula dari peranan Orde Baru yang berusaha membersihkan paham komunis di Indonesia.

Karya sastra, khususnya cerpen, setidaknya merepresentasikan gejala-gejala sosial yang ada pada saat karya sastra tersebut diciptakan, dalam hal ini Peristiwa 1965. Tercatat semenjak peristiwa tersebut, antara tahun 1966—1970, sedikitnya ada sepuluh cerpen bertemakan peristiwa 1965 di majalah *Horison* dan *Sastra*. Sebagian dari sepuluh

¹ Apa yang dimaksud Peristiwa 1965 adalah peristiwa pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh komunis pada masa setelah terjadinya Gerakan 30 September di Indonesia. Diperkirakan lebih dari setengah juta orang dibantai dan lebih dari satu juta orang dipenjara dalam peristiwa tersebut. Pembersihan ini merupakan peristiwa penting dalam masa transisi ke Orde Baru: Partai Komunis Indonesia (PKI) dihancurkan, pergolakan mengakibatkan jatuhnya presiden Soekarno, dan kekuasaan selanjutnya diserahkan kepada Soeharto.



cerpen tersebut dikumpulkan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Harry Aveling pada 1975 yang berjudul *Gestapu: Indonesian Short Stories on the Abortive Coup of 30 September 1965* terbitan University of Hawai. Karya-karya ini merupakan sebagian dari karya sastra pertama yang mendobrak kebisuan tentang penghancuran komunisme pada peristiwa 1965 (Herlambang, 2013:102).

Di luar sepuluh cerpen tersebut, ada banyak cerita pendek yang berkaitan atau bercerita tentang Peristiwa 1965. Beberapa cerpen tersebut dimuat dalam media massa, seperti surat kabar atau majalah. Sebagai salah satu *genre* sastra, cerpen adalah salah satu bentuk sastra yang paling mudah diakses. Setiap hari Minggu, rata-rata surat kabar atau koran di Indonesia menerbitkan sebuah cerpen. Surat kabar tersebut merupakan surat kabar besar yang berskala lokal dan nasional. Beberapa surat kabar yang memuat cerpen setiap minggunya adalah *Kompas*, *Jawa Pos*, *Koran Tempo*, *Media Indonesia*, *Republika*, dan beberapa koran lokal, seperti *Suara Merdeka*, *Kedaulatan Rakyat*, *Tribun Jabar*, *Bali Post*, *Lampung Post*, *Riau Pos*, *Padang Ekspres*, dan sebagainya.

Dari berbagai media tersebut, banyak kalangan yang sepakat bahwa cerpen-cerpen di *Kompas* lebih bagus daripada yang dipublikasikan di majalah sastra *Horison* (Sularto, 2007:232; Dewanto, 2002:8). *Kompas* sebagai media massa berskala nasional telah menjadi barometer bagi sastra koran. Media ini tidak hanya memimpin dalam hal jumlah oplah koran yang dicetak untuk skala nasional, tetapi juga dalam hal pemuatan cerpen, media ini unggul. Cerpen-cerpen yang dimuat di harian *Kompas* untuk selanjutnya dikenal sebagai cerpen *Kompas*. Beberapa pengarang terkemuka ikut mewarnai cerpen-cerpen di harian *Kompas*, antara lain AA Navis, Gerson Poyk, Setyagraha Hoerip, Budi Darma, Danarto, Nh. Dini, Umar Kayam, Hamsad Rangkuti, Kuntowijoyo, dan Motinggo Busye. Di samping itu, terekam sejumlah karya dari generasi yang lebih muda, di antaranya Seno Gumira Ajidarma, Agus Noor, Indra Tranggono,

² Sebutan dari Orde Baru untuk pemerintahan Presiden Soekarno.

³ Angkatan ini muncul bukan semata-mata karena Peristiwa 1965, tetapi merupakan perlawanan tegas terhadap penyelewengan ideologi Pancasila dan perusakan kebudayaan oleh Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat)/PKI (Jassin, 2013:37). Angkatan ini ditandai dengan rilisnya *Horison*, majalah sastra yang didirikan oleh para penanda tangan Manifes Kebudayaan (Herlambang, 2013:102). Manifes kebudayaan adalah konsep kebudayaan yang mengusung ideologi humanisme universal. Manifes Kebudayaan ini adalah bentuk respon dari teror-teror dalam ranah budaya yang dilancarkan oleh orang-orang yang tergabung dalam Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat).



Yanusa Nugroho, Triyanto Triwikromo, Gus tf Sakai, Ratna Indraswari Ibrahim, Leila S. Chudori, dan Djenar Maesa Ayu.

Selain itu, *Kompas* juga rajin menerbitkan antologi cerpen terbaik setiap tahunnya⁴. Sampai tahun 2015, tercatat ada 22 buku kumpulan cerpen *Kompas* terbit. Kedua puluh dua buku kumpulan cerpen *Kompas* tersebut adalah (1) *Kado Istimewa: Cerpen Pilihan Kompas 1992*; (2) *Pelajaran Mengarang: Cerpen Pilihan Kompas 1993*; (3) *Lampor: Cerpen Pilihan Kompas 1994*; (4) *Laki-laki yang Kawin dengan Peri: Cerpen Pilihan Kompas 1995*; (5) *Pistol Perdamaian: Cerpen Pilihan Kompas 1996*; (6) *Anjing-anjing Menyerbu Kuburan: Cerpen Pilihan Kompas 1997*; (7) *Derabat: Cerpen Pilihan Kompas 1999*; (8) *Dua Tengkorak Kepala: Cerpen Pilihan Kompas 2000*; (9) *Mata yang Indah: Cerpen Pilihan Kompas 2001*; (10) *Jejak Tanah: Cerpen Pilihan Kompas 2002*; (11) *Waktu Nayla: Cerpen Pilihan Kompas 2003*; (12) *Sepi Pun Menari di Tepi Hari: Cerpen Pilihan Kompas 2004*; (13) *Jl. "Asmaradana": Cerpen Pilihan Kompas 2005*; (14) *Ripin: Cerpen Kompas Pilihan 2005—2006*; (15) *Cinta di Atas Perahu Cadik: Cerpen Kompas Pilihan 2007*; (16) *Smokol: Cerpen Kompas Pilihan 2008*; (17) *Pada Suatu Hari, Ada Ibu dan Radian: Cerpen Kompas Pilihan 2009*; (18) *Dodolitdodolitdodolibret: Cerpen Pilihan Kompas 2010*; (19) *20 Tahun Cerpen Pilihan Kompas: Dari Selawat Dedaunan sampai Kunang-kunang di Langit Jakarta*; (20) *Laki-laki Pemanggul Goni: Cerpen Pilihan Kompas 2012*; (21) *Klub Solidaritas Suami Hilang: Cerpen Pilihan Kompas 2013*; dan (22) *Di Tubuh Tarra, dalam Rahim Pohon: Cerpen Pilihan Kompas 2014*. Cerpen-cerpen yang dibukukan dalam buku-buku tersebut kemudian disebut sebagai cerpen pilihan *Kompas*.

Orde Baru berkuasa, saat Peristiwa 1965 disebut-sebut sebagai tragedi berdarah yang tidak pantas terulang, dengan masa ketika Orde Baru lengser, saat Peristiwa 1965 mulaidilihat dari beragam perspektif, terutama dari sudut pandang korban.

Dalam penelitian ini digunakan analisis wacana kritis atau *critical discourse analysis* untuk menganalisis peristiwa 1965 dalam cerpen-cerpen pilihan *Kompas*

⁴ Kecuali tahun 1998 dan 2005-2006. Pada 1998 anugerah cerpen terbaik dan buku kumpulan cerpen pilihan *Kompas* tidak ada. Pada 2005-2006, anugerah dan buku kumpulan cerpen pilihan *Kompas* diadakan dua tahun sekali. Namun, di samping yang tahunan, juga diterbitkan dua buku khusus kumpulan cerpen per dasawarsa, yaitu untuk tahun 1970—1980 dengan judul *Dua Kelamin bagi Midin: Cerpen Kompas Pilihan 1970—1980* dan tahun 1981—1990 dengan judul *Riwayat Negeri yang Haru: Cerpen Kompas Terpilih 1981—1990*.



Berbeda dengan analisis wacana, analisis wacana kritis tidak menekankan aspek semantik dan sintaksis. Akan tetapi, wacana kritis melihat wacana—pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan—sebagai bentuk dari praktik yang menyebabkan sebuah hubungan dialektis antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi, institusi, dan

Secara leksikal, wacana merupakan (1) komunikasi verbal; percakapan; (2) *Ling* keseluruhan tutur yang merupakan satu kesatuan; (3) *Ling* satuan bahasa terlengkap yang direalisasikan dalam bentuk karangan atau laporan utuh; (4) kemampuan atau prosedur berpikir secara sistematis (KBBI, 2014:1552). Akan tetapi, wacana di sini dipahami sebagai mana yang diuraikan oleh Foucault (via Eriyanto, 2009:65), yakni sesuatu yang memproduksi sesuatu yang lain (sebuah konsep, gagasan, atau efek). Wacana dapat dideteksi karena secara sistematis, suatu ide dibentuk dalam suatu konteks historis tertentu sehingga mempengaruhi cara berpikir dan bertindak. Wacana membatasi bidang pandangan, mengeluarkan sesuatu yang berbeda dalam batas-batas yang telah ditentukan. Pernyataan yang diterima dimasukkan dan mengeluarkan pandangan yang tak diterima tentang suatu objek. Objek bisa jadi tidak berubah, tetapi struktur diskursif yang dibuat membuat objek menjadi berubah (Eriyanto, 2009:74).

Foucault (via Eriyanto, 2009:76) mengungkapkan bahwa ciri dari wacana adalah kemampuannya untuk menjadi suatu himpunan wacana yang berfungsi membentuk dan melestarikan hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu masyarakat. Kekuasaan yang dimaksud di sini adalah berbagai hubungan kekuatan yang saling mendukung sehingga membentuk rangkaian atau sistem, atau sebaliknya, kesenjangan dan kontradiksi yang mengucilkan (Foucault, 2008:121). Dalam suatu masyarakat biasanya terdapat berbagai macam wacana, tetapi kekuasaan memilih dan mendukung wacana tertentu sesuai dengan kepentingannya, struktur sosial yang membentuknya (Fairclough dan Wodak via Eriyanto, 2009:7). Analisis wacana kritis menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna (Eriyanto, 2009:6).

Salah satu hal yang menarik dari konsep wacana menurut Foucault adalah tesisnya mengenai hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Kekuasaan yang



dimaksud Foucault (2008:120—121) bukanlah sebagai himpunan lembaga dan perangkat yang menjamin kepatuhan warga negara di dalam suatu negara tertentu, suatu cara penundukan yang berbentuk aturan, atau suatu sistem dominasi global yang dilaksanakan oleh suatu unsur atau kelompok atas yang lain, tetapi kekuasaan dipahami sebagai (1) bermacam hubungan kekuatan, yang imanen di bidang hubungan kekuatan itu berlaku, dan yang merupakan unsur-unsur pembentuk dan organisasinya; (2) permainan yang dengan jalan perjuangan dan pertarungan tanpa henti mengubah, memperkokoh, memutarbalikkannya; (3) berbagai hubungan kekuatan yang saling mendukung sehingga membentuk rangkaian atau sistem, atau sebaliknya, kesenjangan, dan kontradiksi yang saling mengucilkan; (4) strategi tempat hubungan-hubungan kekuatan itu berdampak, dan rancangan umumnya atau kristalisasinya dalam lembaga terwujud dalam perangkat negara, perumusan hukum, dan hegemoni sosial.

Kekuasaan adalah perangkaian yang bertopang pada setiap mobilitas dan sebaliknya berusaha membekukan mereka (Foucault, 2008:122). Kuasa, menurut Foucault tidak dimiliki tetapi dipraktekkan dalam suatu ruang lingkup di mana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu sama lain. Kalau banyak teoretisi lebih memusatkan perhatian pada negara, maka Foucault meneliti kekuasaan lebih kepada individu, subjek yang kecil. Menurut Foucault, seperti dikutip Bartens, strategi kuasa

berlangsung di mana-mana. Di mana saja terdapat susunan, aturan-aturan, sistem-sistem regulasi, di mana saja ada manusia yang mempunyai hubungan tertentu satu sama lain dan dengan dunia, di situ kuasa sedang bekerja. Kuasa tidak datang dari luar tetapi menentukan susunan, aturan-aturan, dan hubungan-hubungan itu dari dalam (Eriyanto, 2012:65—66).

Strategi kuasa tidak bekerja melalui penindasan, melainkan melalui normalisasi dan regulasi, menghukum dan membentuk publik yang disiplin. Publik tidak dikontrol lewat kekuasaan yang sifatnya fisik, tetapi dikontrol, diatur, dan disiplinkan lewat wacana. Kekuasaan dalam pandangan Foucault disalurkan melalui hubungan sosial, di mana memproduksi bentuk-bentuk kategorisasi perilaku sebagai baik atau buruk,



sebagai bentuk pengendalian perilaku. Relasi sosial itulah yang memproduksi bentuk subjektivitas dan perilaku lebih dari secara sederhana digambarkan sebagai bentuk restriksi. Jadi khalayak ditundukkan bukan dengan cara kontrol yang bersifat langsung dan fisik, tetapi dengan wacana dan mekanisme, berupa prosedur, aturan, tata cara, dan sebagainya (Eriyanto, 2012:67—68).

Kekuasaan dalam masyarakat modern terutama tidak bekerja secara terang-terangan dengan adanya raja yang memerintah atau adanya otoritas individual yang berkuasa dan mengatur kehidupan seseorang. Kekuasaan justru bekerja secara tidak terlihat, tanpa disadari dengan praktik disiplinisasi. Kontrol dan membentuk individu yang patuh dan disiplin adalah wujud kekuasaan yang ada di mana-mana. Bagi Foucault kekuasaan ada di mana-mana (*omnipresent*), yang selalu dinyatakan lewat hubungan, dan diciptakan dalam hubungan yang menunjangnya. Kekuasaan selalu beroperasi melalui konstruksi pengetahuan. Melalui wacana, hubungan antara kekuasaan di satu sisi dengan pengetahuan di sisi lain terjadi (Eriyanto, 2012:70—71).

Kekuasaan adalah akibat langsung dari pemisahan, ketidaksamaan, dan ketidakseimbangan (diskriminasi). Dengan kata lain, kekuasaan merupakan situasi yang intern dengan adanya perbedaan (Salam dan Akmal, 2014:16). Menurut Foucault (2008:124—125), di mana ada kekuasaan, di situ ada perlawanan, atau lebih tepat karena perlawanan tidak pernah berada pada posisi luar terhadap kekuasaan. Perlawanan-perlawanan itu merupakan sisi lain dari hubungan kekuasaan, terpatri di dalamnya dan tak tergoyahkan sebagai pelengkap dialektikanya.

Dalam suatu masyarakat biasanya terdapat berbagai macam wacana yang berbeda satu sama lain, namun kekuasaan memilih dan mendukung wacana tertentu sehingga wacana tersebut menjadi dominan, sedangkan wacana-wacana lainnya akan “terpinggirkan” (*marginalized*) atau “terpendam” (*submerged*). Ada dua konsekuensi dari wacana dominan tersebut. *Pertama*, wacana dominan memberikan arahan bagaimana suatu objek harus dibaca dan dipahami. *Kedua*, struktur diskursif yang tercipta atas suatu objek tidaklah berarti kebenaran (Eriyanto, 2012:77).



Proses terpinggirkannya wacana dalam proses seleksi kekuasaan membawa beberapa implikasi. *Pertama*, khalayak tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan informasi yang beragam dari berbagai sudut mengenai suatu peristiwa. Di sini tidak harus dikatakan bahwa wacana yang terpinggirkan adalah wacana yang benar mengenai suatu peristiwa, tetapi karena tidak banyak ragam perspektif dari suatu wacana maka dimensi peristiwa tidak lengkap. *Kedua*, bisa jadi peminggiran wacana menunjukkan praktik ideologi (Eriyanto, 2012:84).

Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa latin, yaitu *methodos* dan berakar pada kata *meta* yang berarti menuju, melalui, mengikuti, sesudah, dan *hodos* berarti jalan, cara, atau arah. Adapun metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Ratna (2006:46) metode kualitatif memanfaatkan cara-cara penafsiran dengan menyajikannya dalam bentuk deskriptif. Di dalam penelitian ini, data-data yang dikumpulkan adalah teks-teks yang terdapat di dalam cerpen-cerpen pilihan Kompas dari tahun 1992 sampai tahun 2014 sebagai objek material.

Penelitian mengenai Peristiwa 1965 dalam cerpen-cerpen pilihan *Kompas* 1992—2014 ini melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah tahap pengumpulan data. Pengumpulan data adalah seperangkat cara atau teknik yang merupakan perpanjangan indra manusia karena tujuannya untuk mengumpulkan fakta-fakta empiris yang terkait dengan masalah penelitian (Faruk, 2012:24—25). Pada tahap ini, penulis akan mengumpulkan data-data primer dan data-data sekunder yang diperlukan. Pengumpulan data dilakukan di beberapa perpustakaan di Yogyakarta, yakni di Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya UGM, Perpustakaan BPAD DIY, Perpustakaan Balai Bahasa Yogyakarta, dan Perpustakaan Daerah Bantul. Selain itu, data-data tersebut juga berasal dari dokumen-dokumen pribadi yang dimiliki oleh penulis. Data-data primer terdiri dari wacana-wacana yang berkaitan dengan Peristiwa 1965 yang terdapat di dalam cerpen-cerpen pilihan *Kompas* tahun 1992—2014 baik yang berbentuk dialog antartokoh, deskripsi, dan narasi. Sementara itu, data-data sekunder terdiri dari berbagai



macam ulasan dan artikel yang berhubungan dengan Peristiwa 1965.

Setelah tahap pengumpulan data, tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data merupakan proses seperangkat cara atau teknik penelitian yang merupakan perpanjangan dari pikiran manusia karena fungsinya bukan untuk mengumpulkan data, melainkan untuk mencari hubungan antardata yang tidak akan pernah dinyatakan sendiri oleh data yang bersangkutan (Faruk, 2012:25). Pada tahap ini, penulis akan mendeskripsikan wacana-wacana Peristiwa 1965 yang terdapat di dalam cerpen *Kompas* tahun 1992—2014. Adapun teori yang digunakan di dalam analisis ini adalah teori wacana kritis yang dikembangkan oleh Michel Foucault. Kemudian, tahap terakhir adalah menyajikan hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Peristiwa 1965 dalam Cerpen-Cerpen Pilihan *Kompas* yang terbit pada Masa Orde Baru

Cerpen-Cerpen Pilihan *Kompas* mengenai Peristiwa 1965 yang terbit pada masa Orde Baru sangat minim jumlahnya. Dari sekitar 120 cerpen yang dibukukan ke dalam Cerpen-Cerpen Pilihan *Kompas* tahun 1992—1997, hanya ada tiga cerpen yang berani menyinggung mengenai Peristiwa 1965 di antaranya “Penangkapan” dan “Penumpang Kelas Tiga” karya A.A. Navis, serta “Pistol Perdamaian” karya Kuntowijoyo.

Tidak seperti cerpen-cerpen yang terbit setelah Orde Baru runtuh, cerpen-cerpen yang terbit pada masa Orde Baru ini pun hanya menyinggung sedikit saja mengenai Peristiwa 1965. Tidak ada penggambaran secara utuh bagaimana Peristiwa 1965 terjadi atau dampak apa saja yang disebabkan oleh Peristiwa 1965. Di cerpen-cerpen ini, Peristiwa 1965 hanya menjadi latar suasana pendukung jalannya alur cerita. Kemungkinan pemuatan Peristiwa 1965 dalam Cerpen-Cerpen Pilihan *Kompas*, erat kaitannya dengan kekuasaan rezim Orde Baru yang berkuasa pada masa itu. Orde Baru melaksanakan pengawasan ketat terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat, termasuk dalam bidang ekspresi kebudayaan.

Sepanjang periode 1981—1998, kebebasan berpendapat, berorganisasi, dan berbicara sangat dibatasi. Di samping itu, tindakan-tindakan represif yang melanggar



HAM semakin banyak dilakukan, seperti penembakan misterius (Petrus) dan peristiwa Santa Cruz. Kebebasan pers semakin dibatasi, penangkapan dan penghilangan para aktivis dan kaum intelektual semakin banyak dilakukan (Taum, 2015:163). Selama Orde Baru, semua narasi tentang peristiwa G30S berada di bawah pengawasan yang ketat dari pemerintah, khususnya BAKIN, Kopkamtib, dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah dimulainya penumpasan terhadap G30S di tahun 1965, pengawasan politik terhadap kehidupan akademis di Indonesia merupakan terburuk di dunia (Taum, 2015:164).

Peristiwa 1965 dalam Cerpen-Cerpen Pilihan *Kompas* Yang Terbit Setelah Masa Orde Baru

1. Orang yang Dekat dengan Komunis Menjadi Tertuduh Komunis

Dalam cerpen “Ode untuk Sebuah KTP” karya Martin Aleida, Iramani adalah korban kekejaman rezim Orde Baru setelah Peristiwa 1965. Iramani harus menerima hukuman sebagai tahanan politik (tapol) karena suaminya terlibat Peristiwa 1965. Ia dianggap terlibat dalam Peristiwa 1965 sehingga harus menjadi tahanan politik bersama anaknya, Tatiana. Dalam cerpen tersebut, tergambar bagaimana Iramani yang tidak tahu apa-apa mengenai Peristiwa 1965 dan bagaimana keterlibatan suaminya, harus menanggung beban sebagai tahanan, hanya karena ia merupakan istrinya. Ketika diinterogasi, untuk menanyakan sejauh mana keterlibatan Iramani terhadap Peristiwa 1965 yang menyeret suaminya, Iramani hanya terlibat sebatas meminjamkan peniti untuk mengorek debu-debu yang menempel di mesin tik suaminya.

Dalam cerpen tersebut, tergambar bahwa Iramani tidak tahu menahu keterlibatan suaminya dalam Peristiwa 1965. Begitu pula alasan ia harus menjadi tahanan politik—bersama anaknya. Ia diceritakan hanyalah merupakan seorang istri dari pemimpin suatu koran. Bahkan ia pun tidak diceritakan tahu menahu mengenai bagaimana atau apa isi koran yang dipimpin suaminya. Dengan demikian, Iramani adalah tertuduh PKI yang harus menanggung hukuman sebagai seseorang yang bertentangan dengan ideologi negara pada saat itu, di mana semua yang berbau PKI atau komunisme harus dilenyapkan.



Kedua, cerpen “Mata Sultani” karya Adek Alwi, Sultani harus menerima hukuman yang dilakukan oleh massa. Sebagaimana diketahui, ayah Sultani adalah pemimpin organisasi buruh, “*Ayah Sultani kepala terminal sekaligus ketua organisasi buruh*” (Alwi, 2007:71). Sultani dan ibunya pun harus ikut merasakan penderitaan. Mereka sekeluarga pun dibunuh oleh massa secara keji.

Ketiga, cerpen “Pelajaran Pertama bagi Calon Politisi” karya Kuntowijoyo. Ada dua orang yang menjadi calon terkuat pemilihan kepala desa. Salah satu calon kepala desa itu, yang merupakan mantan seorang kapten TNI, menggunakan asal usul Sutarjo, pesaingnya, yang dianggap tidak “bersih lingkungan”, sebagai senjata untuk melemahkan posisi Sutarjo. Sebagaimana diketahui, ayah Sutarjo adalah seseorang yang terlibat dalam Peristiwa 1965.

Posisi ayah Sutarjo yang merupakan seseorang yang terlibat Peristiwa 1965 merupakan posisi lemah. Demikian pula anaknya. Jika asal usul Sutarjo terbongkar, yaitu dia merupakan anak dari seseorang yang terlibat Peristiwa 1965, ia akan mendapat cap negatif dari masyarakat. Cap negatif tersebut dapat membuat masyarakat enggan untuk memilih Sutarjo menjadi kepala desa. Dalam cerpen tersebut, PKI menjadi korban. Dalam sejarahnya, PKI adalah salah satu partai terbesar di Indonesia, selain PNI dan Masyumi. Akibat tuduhan kudeta pada Peristiwa 1965, partai ini mendapat cap negatif—termasuk ideologi komunisme bahkan sampai hari ini.

2. Peristiwa 1965 sebagai Legitimasi Kekerasan

Kekerasan menjadi salah satu aspek yang mendominasi di balik terjadinya Peristiwa 1965. Pada malam 30 September 1965, tujuh pemimpin Angkatan Darat, yaitu Nasution, Ahmad Yani, Suprpto, Soetoyo, Haryono, Panjaitan, dan S. Parman, diculik oleh sekelompok tentara yang dipimpin oleh Kolonel Untung. Namun, karena Nasution berhasil melarikan diri, ajudannya, yaitu Tendean, menjadi sasaran dari sekelompok tentara tersebut. Kemudian, ketujuh jenderal tersebut dibunuh dan mayat mereka dibuang di dalam sebuah sumur di daerah Lubang Buaya. Penculikan ini dianggap oleh Angkatan Darat sebagai upaya makar terhadap pemerintahan. Pada 1 Oktober 1965, Soeharto membuat pernyataan bahwa PKI yang dipimpin oleh D.N Aidit sebagai dalang



di balik peristiwa penculikan dan pembunuhan tersebut. Kemudian, setelah pernyataan tersebut dilontarkan, kampanye kekerasan terhadap PKI dan orang-orang yang berafiliasi pun digencarkan. Kampanye ini mengakibatkan ratusan ribu orang dibunuh dan ditahan⁵.

Apabila melihat jumlah korban yang tidak sedikit, dapat dipastikan bahwa kekerasan yang dilakukan sangatlah terstruktur, bahkan Heryanto (2016:90) mengungkapkan bahwa kekerasan ini merupakan sebetulnya terorisme negara, bukan konflik horizontal antargolongan dalam masyarakat. Lebih lanjut ia menengarai bahwa peristiwa kekerasan sejak 1965 hanya mungkin terlaksana berkat sponsor besar-besaran dari aparaturnya. Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa Peristiwa 1965 menjadi salah satu alat legitimasi untuk melakukan kekerasan untuk mencapai suatu kekuasaan. Hal ini pun terefleksikan di dalam cerpen-cerpen *Kompas*. Pertama, cerpen "Koh Su" karya Puthut Ea. Di dalam cerpen ini diceritakan seorang pedagang nasi goreng yang menjadi korban pembantaian Peristiwa 1965.

Selain "Koh Su", cerpen lainnya yang merepresentasikan Peristiwa 1965 sebagai legitimasi kekerasan adalah cerpen "Burung Api Siti" yang ditulis oleh Triyanto Triwikromo. Seorang anak bernama Siti menyaksikan pembantaian yang dilakukan terhadap beberapa warga di desanya. Para pembantai tersebut beranggapan bahwa warga di desa Siti merupakan warga yang menistakan agama dan ikut berperan dalam pembunuhan para jenderal. Para pembantai tersebut menganggap bahwa warga desa Siti dan keturunannya adalah sebuah ancaman. Apabila mereka tidak dibunuh, maka para pembantai dan keturunannya yang akan dibunuh. Tidak hanya itu, pembantaian yang dilakukan tersebut bahkan dianggap sebagai "tugas negara". Tidak ada penyesalan dan rasa bersalah dalam melakukan itu. Mereka menganggap bahwa hal ini merupakan sesuatu yang wajar.

⁵ Sampai saat ini, jumlah orang yang menjadi korban masih dalam perdebatan. Dalam tulisannya, Cribb (1990:12) menyajikan berbagai macam varian data mengenai estimasi jumlah korban yang berhasil ia kumpulkan.



Tidak hanya pembantaian, kekerasan yang dilakukan pascaperistiwa 1965 adalah penangkapan secara paksa terhadap orang-orang yang dianggap massa PKI tanpa melalui proses peradilan. Hal ini direpresentasikan dalam cerpen “Candik Ala” karya GM Sudharta. Selain itu, di dalam cerpen “Darah Pembasuh Luka” karya Made Andyan Ole juga terdapat adanya kekerasan yang dilakukan pascaperistiwa 1965. Kekerasan ini dirasa wajar karena melakukan pemberantasan terhadap pengkhianat bangsa.

Cerpen “Mangku Mencari Doa di Daratan Jauh” yang ditulis oleh Martin Aleida. Mangku memiliki semacam dendam dengan masyarakat Bali. Ia merasa sakit hati tatkala ayahnya dibunuh secara beramai-ramai dengan linggis dan jasadnya dikubur tanpa doa seperti pada pemakaman orang lain pada umumnya. Hal ini disebabkan ayah Mangku menerimatanah secara cuma-cuma dari sebuah organisasi tani, padahal ia tidak tahu-menahu mengenai organisasi tersebut.

Selain itu, kekerasan dengan pola hampir serupa juga terlihat dalam cerpen “Sang Petruk” karya GM Sudharta. Selanjutnya, dalam cerpen “Tawanan” karya Kuntowijoyo, seseorang yang baru di dinas kemiliteran mengaku salah tangkap terhadap terduga PKI. Mulanya mereka menangkap dua orang yang diduga komunis. Mereka menemukan kedua orang itu akibat operasi militer di daerah yang diduga sebagai markas komunis.

Penutup

Dalam cerpen-cerpen *Kompas* yang termuat dalam antologi cerpen pilihan *Kompas* dari tahun 1992—2014, setidaknya ada 16 cerpen yang memuat wacana mengenai Peristiwa 1965. Apabila diklasifikasikan berdasarkan masa publikasinya, cerpen-cerpen tersebut dapat dibagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan cerpen yang diterbitkan pada masa Orde Baru berkuasa. Pada masa ini, dapat dilihat bahwa wacana mengenai Peristiwa 1965 sangatlah minim, yaitu hanya ada tiga cerpen yang membahas peristiwa tersebut. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari Pemerintahan Orde Baru yang terus memproduksi wacana mengenai Peristiwa 1965 menurut versi mereka. Peristiwa 1965 dianggap sebagai peristiwa yang tabu dan mengerikan, padahal seiring berjalannya waktu, banyak fakta-fakta baru yang bertentangan dengan wacana



yang dibuat dengan versi pemerintah. Namun, oleh karena pemerintah pada masa itu otoriter, pembicaraan fakta-fakta tersebut tidaklah bebas. Hal ini pun tercermin dalam cerpen-cerpen *Kompas*. Pada masa ini, terdapat dua wacana mengenai Peristiwa yang sangat tampak. Wacana yang pertama adalah adanya penempatan massa PKI sebagai pihak yang bersalah. Selain itu, wacana yang lainnya adalah adanya legitimasi kekerasan yang bertumpu pada Peristiwa 1965. Oleh adanya peristiwa ini, pihak lain diperbolehkan untuk melakukan kekerasan terhadap pihak yang bersalah, dalam hal ini PKI.

Kemudian, golongan kedua adalah golongan cerpen yang terbit setelah Pemerintahan Orde Baru, yakni pada tahun 1999—2014. Berbeda dengan golongan sebelumnya, pada masa ini, cerpen-cerpen yang memuat wacana Peristiwa 1965 cukup banyak. Setidaknya ada tiga belas cerpen yang ditemukan memuat hal tersebut. Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari kebebasan berpendapat pascalengsernya Pemerintahan Orde Baru. Pada masa ini, represi yang dibuat oleh Pemerintahan Orde Baru pun hilang. Berbagai macam pendapat dapat disampaikan secara bebas dan terbuka. Hal ini dapat dilihat dari beberapa wacana mengenai Peristiwa 1965 yang hadir di dalam cerpen-cerpen *Kompas*. Adapun wacana-wacana tersebut adalah adanya wacana bahwa orang yang dekat dengan orang-orang komunis dituduh sebagai komunis, padahal mereka tidak berafiliasi dengan PKI. Hal ini merupakan upaya untuk menghadirkan pola pikir baru bahwa tidak semua orang yang dituduh komunis berafiliasi dengan massa PKI. Ia hanya dijadikan sebagai korban dari peristiwa tersebut. Selain itu, pada masa ini, wacana mengenai Peristiwa 1965 yang dijadikan legitimasi kekerasan masih tampak jelas di dalam cerpen-cerpen *Kompas*. Hal ini digunakan untuk mendukung wacana yang pertama, yaitu untuk mengungkap bagaimana penderitaan yang disebabkan oleh tuduhan tersebut.



Daftar Kepustakaan

- Alwi, Adek. 2007. "Mata Sultani" dalam Ninuk Mardiana Pambudy. 2007. *Ripin: Cerpun Kompas Pilihan 2005—2006*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Eriyanto. 2009. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: Lkis.
- Faruk. 2012. *Metode Penelitian Sastra: Sebuah Penjelajahan Awal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Foucault, Michel. 2008. *La Volonte de Savoir, Ingin Tahu Sejarah Seksualitas*. Diterjemahkan oleh Rahayu S. Hidayat. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Herlambang, Wijaya. *Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Seni dan Sastra*. Cetakan Kedua. Tangerang: Marjin Kiri.
- Heryanto, Ariel. 2016. "Negara dan Maaf 1965" dalam Majalah *Tempo* edisi 8 Mei
- Tim Penyusun. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Salam, Aprinus dan Ramayda Akmal. 2014. *Pahlawan dan Pecundang Militer dalam Novel-Novel Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sularto, St (Peny.). 2007. *Kompas: Menulis dari Dalam*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas